

Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Moral dalam Meningkatkan Kesadaran K3 di Industri

Yayuk Muji Rahayu^{ab, 1*}, Suyato^{b, 2}, Setiawati^{a, 3}

^a Universitas Pamulang, Indonesia

^b Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ yayukmuji.2024@student.uny.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 24 Maret 2025;

Revised: 10 April 2025;

Accepted: 30 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja;

Kesadaran K3;

Teori Perilaku Berencana;

Konstruktivisme Sosial.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan industri. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis berbagai sumber akademik dan regulasi terkait K3. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai PKn, seperti tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap rekan kerja, tanggung jawab, kepatuhan hukum, partisipasi aktif, dan solidaritas sosial, diyakini dapat berperan dalam membentuk budaya keselamatan kerja secara signifikan meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan, mengurangi risiko kecelakaan, serta membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Teori Konstruktivisme Sosial dan *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menjelaskan bagaimana interaksi sosial dan sikap positif terhadap K3 mempengaruhi kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dalam merancang program pelatihan K3 yang efektif, dengan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan sebagai bagian dari budaya organisasi.

ABSTRACT

Integration of Citizenship Education in Increasing Occupational Safety and Health Awareness in Industrial Environments. This study aims to analyze the integration of Civic Education values in increasing awareness of Occupational Safety and Health in the industrial environment. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, which involves the analysis of various academic sources and regulations related to K3. The findings of the study indicate that strengthening Civic Education values, such as social responsibility and concern for coworkers, responsibility, legal compliance, active participation, and social solidarity, are believed to play a role in forming a work safety culture that significantly increases worker compliance with safety procedures, reduces the risk of accidents, and builds a safer and more productive work environment. Social Constructivism Theory and Theory of Planned Behavior are used to explain how social interaction and positive attitudes towards K3 affect worker compliance with safety procedures. This study provides practical implications for companies in designing effective K3 training programs, emphasizing the importance of internalizing civic values as part of organizational culture.

Keywords:

Citizenship Education;

Occupational Safety and

Health;

K3 Awareness;

Theory of Planned Behavior;

Social Constructivism.

Copyright © 2025 (Yayuk Muji Rahayu, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Rahayu, Y. M., Suyato, S., & Setiawati, S. (2025). Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Moral dalam Meningkatkan Kesadaran K3 di Industri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 818–832. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.11799>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan selama periode Januari hingga Agustus 2024. Total insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia mencapai 278.564 kasus. Dari total tersebut, sebanyak 91,86% merupakan peserta yang menerima upah, 7,23% berasal dari peserta yang tidak menerima upah, dan 0,91% melibatkan peserta dari sektor jasa konstruksi. Berdasarkan data dari ILO, sekitar 2,78 juta kematian pekerja terjadi setiap tahun karena faktor kecelakaan kerja atau penyakit terkait pekerjaan. Dari jumlah tersebut, Sebanyak lebih dari 380.000 kasus (13,7%) terjadi akibat kecelakaan kerja. Selain itu, (ILO, 2018) mengungkapkan Diperkirakan ada 375 juta kasus kecelakaan kerja non-fatal setiap tahun, jumlah yang jauh melampaui kecelakaan kerja yang berujung pada kematian. Kondisi ini tentu memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan para pekerja.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Heinrich, mayoritas kecelakaan kerja sekitar 88% dikarenakan perilaku tidak aman (*unsafe action*) yang dilakukan oleh individu. Sementara itu, sekitar 10% kecelakaan terjadi akibat kondisi kerja yang berbahaya (*unsafe condition*). Di Indonesia, berdasarkan data statistik, sekitar 80% kecelakaan kerja berasal dari faktor perilaku tidak aman, sedangkan 20% lainnya dipicu oleh kondisi lingkungan kerja yang berisiko (Primadianto et al., 2018). Tindakan tidak aman (*unsafe action*) merujuk pada perilaku yang tidak selaras dengan peraturan yang berlaku dan berisiko membahayakan diri sendiri, orang lain, serta peralatan yang digunakan (Hasrinal, Darma, I. Y., & Diana, 2018). Menurut (Irzal, 2016), Tindakan tidak aman (*unsafe action*) mencakup kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kelelahan, serta cacat fisik yang tidak tampak. Sementara itu, kondisi tidak aman (*unsafe condition*) mencakup penggunaan alat pelindung diri dan pakaian kerja yang kurang sesuai, keberadaan bahan berbahaya, sistem ventilasi dan pencahayaan yang tidak memadai, serta pengoperasian peralatan atau mesin yang tidak memenuhi standar keselamatan menjadi faktor penyumbang risiko kecelakaan kerja. Kombinasi kedua faktor ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pekerja, penerapan standar keselamatan yang ketat, serta pengawasan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selain *unsafe action* dan *unsafe condition*, kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan oleh tindakan dan kondisi yang tidak aman, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu (misalnya usia, pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, kondisi fisik, dan sikap), faktor manajerial (seperti pelatihan K3, kebijakan, SOP, dan sosialisasi), serta aspek lingkungan kerja seperti pencahayaan, ventilasi, kebersihan, kebisingan, serta sistem peringatan visual ((ILO, 1998).

Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja meliputi kurangnya implementasi prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh para pekerja. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksiapan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), penempatan barang dan alat kerja yang tidak teratur, serta pola pikir sebagian pekerja yang menganggap kecelakaan kerja sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, penggunaan APD yang lengkap dapat mengurangi risiko terjadinya cedera (Indah, 2017). Kecelakaan kerja ini telah menimbulkan berbagai dampak, baik dalam bentuk kerugian materi, hilangnya waktu kerja, maupun dampak bagi individu yang mengalaminya (Irkas, Fitri, Purbasari, & Pristya, 2020). Pekerja yang hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tanpa disertai praktik langsung cenderung kurang efektif dalam upaya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh sebab itu, implementasi K3 harus diterapkan. sejak dini sebelum

seseorang memasuki dunia kerja, agar prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dapat diterapkan secara optimal dalam setiap aktivitas pekerjaan (John, 2008).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan teknis dalam implementasi prosedur K3, tetapi juga lemahnya kesadaran kolektif tentang hak, kewajiban, dan keadilan di lingkungan kerja. Salah satu akar masalah rendahnya kepatuhan K3 adalah kurangnya internalisasi nilai-nilai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan dalam budaya kerja. Pelatihan K3 konvensional cenderung fokus pada aspek teknis, seperti prosedur penggunaan alat pelindung diri, namun mengabaikan dimensi psikologis dan etika. Padahal, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembentuk karakter memiliki potensi untuk memperkuat kesadaran pekerja Mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab moral di lingkungan kerja, Penerapan sistem K3 membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen organisasi, termasuk manajemen dan karyawan, di mana keberhasilannya ditentukan oleh komitmen, pemahaman, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat (Saraswati, Ridwan, & Iwan Candra, 2020). Di sinilah konsep pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) menawarkan perspektif baru melalui pendekatan pembentukan karakter partisipatif dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana ditegaskan Branson (1998), berperan membangun kesadaran kritis warga negara terhadap hak atas lingkungan aman (Pasal 27 UUD 1945) serta kewajiban untuk mematuhi regulasi dan melaporkan pelanggaran. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam program K3 dapat menciptakan mekanisme bottom-up di mana pekerja tidak hanya sebagai objek pasif, tetapi subjek aktif yang berdaya menolak praktik kerja berisiko dan terlibat dalam pengawasan kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reasoa & Wibowo (2022) Dalam perusahaan tersebut, terdapat indikasi bahwa para karyawan kurang memahami konsep *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) serta menerima dukungan yang terbatas dari pemimpin. Situasi ini berdampak pada kurang optimalnya kinerja karyawan. OCB sendiri merupakan konsep yang berkontribusi besar dalam mendorong Ketika para pekerja menunjukkan OCB yang tinggi, hal ini berdampak langsung pada efisiensi dan produktivitas organisasi, maka produktivitas perusahaan cenderung meningkat. Selanjutnya, Studi yang dilakukan oleh Endriastuty & Adawia (2018) mengungkapkan bahwa salah satu metode untuk memperkuat budaya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja merupakan melalui pelatihan, pelatihan, serta penyebaran informasi yang lebih intensif mengenai K3. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan formal maupun informal agar seluruh pekerja dapat lebih memahami serta menguasai konsep dan penerapan K3 dalam lingkungan kerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Kurniati, (2025) menyatakan bahwa penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan sosial dalam menciptakan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif pekerja dalam pelatihan, diskusi, dan proses pengambilan keputusan, rasa solidaritas serta tanggung jawab bersama dapat diperkuat, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Selain membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, keterlibatan ini juga menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap rekan kerja, yang mendukung keberlanjutan organisasi.

Berdasarkan tiga penelitian diatas maka masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap keselamatan serta kesehatan kerja di lingkungan industri. belum ada penelitian yang secara eksplisit menyoroti bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat

diintegrasikan sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kesadaran K3 di industri. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kewarganegaraan yang dapat dikaitkan dengan peningkatan kesadaran K3, seperti tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan partisipasi aktif. Menganalisis bagaimana PKN dapat diintegrasikan dalam program K3, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, maupun pendekatan berbasis komunitas di tempat kerja. Menyusun model teoretis yang menggambarkan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan budaya keselamatan kerja, sehingga dapat menjadi referensi bagi industri dalam meningkatkan kesadaran K3 secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi model integratif tersebut, seperti resistensi budaya kerja, keterbatasan sumber daya pelatihan, dan kesenjangan pemahaman antara manajemen dan pekerja. Dengan menggabungkan pendekatan teoritis konstruktivisme sosial (Vygotsky, 1978) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjadi dasar dalam penelitian ini merancang kerangka kerja yang menekankan pada pembentukan perilaku melalui interaksi sosial dan internalisasi nilai. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini akan mengeksplorasi konsep, teori, serta praktik yang dapat menghubungkan PKN dengan peningkatan budaya K3, sehingga menghasilkan wawasan baru yang dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi dalam penerapan keselamatan kerja di industri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis peran nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran K3 di sektor industri. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kajian literatur tanpa melakukan pengumpulan data primer (Creswell, 2014). Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis berbagai sumber akademik, seperti buku Sugiyono (2019), jurnal ilmiah, serta regulasi terkait K3 dan pendidikan karakter. Data yang diperoleh diklasifikasikan, dibandingkan, dan disintesis guna menemukan pola serta hubungan antar variabel yang relevan (Zead, 2008). Dengan metode ini, penelitian dapat menyajikan landasan konseptual yang kuat serta memberikan analisis dan wawasan teoretis nilai-nilai kewarganegaraan dapat diinternalisasi dalam perilaku pekerja terhadap K3.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai K3 dapat ditingkatkan melalui penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan industri. Integrasi PKN dalam konteks industri memberikan landasan normatif bagi pekerja dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait keselamatan kerja. Selain itu, lingkungan kerja perusahaan dengan budaya keselamatan yang kuat cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap prosedur K3.

Studi literatur dalam penelitian ini berfokus pada dua teori utama yang menjadi dasar analisis, yaitu Teori Konstruktivisme Sosial dari Vygotsky (1978) dan Menurut *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), sementara Teori Konstruktivisme Sosial mengungkapkan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial, di mana individu membangun pemahaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan serta individu lainnya. Dalam konteks industri, pekerja menginternalisasi nilai-nilai K3 melalui pelatihan berbasis Pendidikan Kewarganegaraan, di mana regulasi dan kebijakan keselamatan kerja

menjadi alat pembelajaran yang membentuk perilaku keselamatan melalui interaksi sosial di tempat kerja.

Sementara itu, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, serta pandangan terhadap kontrol atas perilaku. Dalam konteks K3, pekerja akan lebih patuh terhadap aturan keselamatan jika mereka memiliki sikap positif terhadap K3, menerima norma sosial yang mendukung keselamatan, serta merasa memiliki kontrol atas perilaku mereka. Studi menunjukkan bahwa pendidikan yang menanamkan kesadaran akan konsekuensi pelanggaran K3 dapat meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap regulasi keselamatan.

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa nilai utama yang berperan dalam meningkatkan kesadaran K3, yaitu nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan kesadaran hukum. Nilai tanggung jawab mencerminkan pemahaman pekerja terhadap kewajiban mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nilai kedisiplinan berkontribusi pada kesadaran pekerja untuk mengikuti prosedur K3 yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai kepedulian sosial menumbuhkan rasa saling menjaga di antara pekerja agar keselamatan kerja dapat terwujud, sedangkan nilai kesadaran hukum memastikan bahwa pekerja memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran K3 yang dapat berdampak pada diri sendiri dan lingkungan kerja.

Studi ini menganalisis berbagai literatur akademik yang membahas hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan penerapan K3 di lingkungan industri. Regulasi pemerintah terkait keselamatan kerja serta kebijakan perusahaan yang mengatur standar keselamatan pekerja menjadi bahan utama dalam analisis ini. Melalui kajian ini, dapat dipahami bagaimana regulasi dan kebijakan keselamatan diterapkan dalam lingkungan kerja dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

Berdasarkan analisis kepustakaan, ditemukan bahwa pendekatan berbasis Pendidikan Kewarganegaraan dapat memperkuat kesadaran pekerja akan pentingnya K3. Dalam perspektif Konstruktivisme Sosial, pemahaman pekerja terhadap nilai-nilai keselamatan kerja terbentuk melalui interaksi sosial, baik dalam lingkungan pendidikan maupun industri. Sementara itu, berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran keselamatan kerja dipengaruhi oleh norma subjektif (lingkungan kerja), sikap terhadap keselamatan, dan kontrol perilaku pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap K3 bukan hanya dipengaruhi oleh pengetahuan teknis semata, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis yang membentuk pola pikir pekerja.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kebijakan industri dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap K3. Dengan menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks industri, pekerja tidak hanya memahami regulasi keselamatan kerja, tetapi juga memiliki motivasi intrinsik untuk menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dalam aktivitas sehari-hari.

Tabel 1. Studi Literatur tentang K3 dan Pendidikan Kewarganegaraan

Penulis	Judul	Fokus kajian	Temuan
Rhendy May Perdana, 2021	Analysis of Theory of Planned Behavior (TPB) in	Analisis tentang perilaku tidak patuh terhadap	(1) Sikap Mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap tingkat intensitas, (2) norma

	Disobedience Behavior towards Occupational Health and Safety (K3)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan dengan menggunakan Theory of Planned Behavior	subjektif turut memberikan dampak positif dan signifikan terhadap intensi, (3) persepsi individu terhadap kontrol perilaku juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap intensi, (4) intensi berperan secara positif dan signifikan dalam memengaruhi perilaku, serta (5) Persepsi terhadap kontrol perilaku memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tindakan yang dilakukan secara nyata.
Rahayu, Y. M., & Kurniati, P. (2025)	Membangun Budaya Keselamatan Kerja melalui Partisipasi Sosial untuk Memperkuat Kesadaran Kewarganegaraan	Peran partisipasi sosial dalam memperkuat budaya keselamatan kerja serta meningkatkan kesadaran kewarganegaraan pekerja	(1) Partisipasi social pekerja meningkatkan budaya keselamatan kerja. (2) Keterlibatan dalam pelatihan, diskusi, dan pengambilan keputusan memperkuat kepatuhan terhadap protokol keselamatan. (3) Keterlibatan sosial dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan sekaligus membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. (4) Nilai-nilai kewarganegaraan terinternalisasi melalui budaya keselamatan kerja yang kuat.
Irkas, A. U. D., Fitri, A. M., Purbasari, A. A. D., & Pristya, T. Y. (2020).	Hubungan Unsafe Action dan Unsafe Condition dengan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Industri Mebe	Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja dalam industri mebel.	1. Masa kerja, pemahaman K3, dan upaya menghindari tindakan berisiko memiliki hubungan signifikan dengan kecelakaan kerja. 2. Usia, jam kerja, dan kondisi tidak aman <i>unsafe condition</i> tidak menunjukkan Memiliki keterkaitan yang erat dengan kecelakaan kerja. 3. kesadaran saat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD): menjaga kebersihan, serta menerapkan prinsip K3. dapat membantu mengurangi kecelakaan kerja.
Reaso, M. M., & Wibowo, D. H. (2022).	Hubungan Servant Leadership Dengan Organizational	hubungan antara Servant Leadership dan Organizational Citizenship Behavior (OCB)	Semakin baik penerapan Servant Leadership, semakin besar pula kontribusi karyawan dalam menunjukkan OCB.

	Citizenship Behavior Pada Karyawan	pada karyawan perusahaan XYZ.	
Swaputri, E. (2010).	Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja	identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja di PT. Jamu Air Mancur.	Upaya pencegahan kecelakaan kerja perlu difokuskan pada peningkatan pelatihan K3, penggunaan APD, perbaikan sikap kerja, serta perbaikan kondisi lingkungan kerja.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun budaya keselamatan kerja di lingkungan industri.

Integrasi Nilai-Nilai PKn dalam K3. Dalam konteks K3, beberapa nilai PKn yang dapat diintegrasikan meliputi: (1) Tanggung Jawab Sosial: Rasa tanggung jawab memiliki peran krusial dalam membangun akuntabilitas, mendorong refleksi, serta meningkatkan pemahaman terhadap konsekuensi dari setiap tindakan individu (Hakim et al., 2024). Pekerja diharapkan untuk tidak hanya menjaga keselamatan Tidak hanya keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan rekan kerja. Nilai ini mendorong pekerja turut serta secara aktif dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman. Kepedulian Terhadap Sesama dengan menumbuhkan empati dan kepedulian di antara karyawan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan kerja. Pekerja yang peduli akan lebih cenderung melaporkan potensi bahaya dan mematuhi prosedur keselamatan. (2) Kepatuhan Hukum: Kesadaran hukum adalah pemahaman yang tertanam dalam diri setiap individu untuk menaati serta mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku, terutama ketika hukum tersebut dianggap baik dan adil (Belladonna & Anggraena, 2019). Mematuhi regulasi dan standar keselamatan kerja merupakan bagian dari nilai kepatuhan hukum yang diajarkan dalam PKn, yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman. (3) Etika: Nilai etika mendorong pekerja untuk bertindak dengan integritas dan mempertimbangkan keselamatan diri dan rekan kerja dalam setiap tindakan mereka. Etika Pancasila adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan dan keputusan moral yang selaras Sesuai dengan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia. (Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, 2021). (4) Partisipasi: Mendorong pekerja untuk aktif berpartisipasi dalam program Keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelaporan potensi risiko di lingkungan kerja. (5) Berpikir Kritis: Kemampuan dalam mengevaluasi kondisi serta mengambil keputusan yang sesuai demi menjaga keselamatan kerja. Keterampilan berpikir kritis merujuk pada kapasitas individu dalam menelaah, menganalisis, serta menilai informasi secara logis dan mendalam (Sukmayadi et al., 2024). (6) Solidaritas Sosial: Membangun rasa kepedulian terhadap sesama pekerja dan lingkungan kerja, yang mendukung keberlanjutan organisasi dan menciptakan budaya keselamatan yang baik.

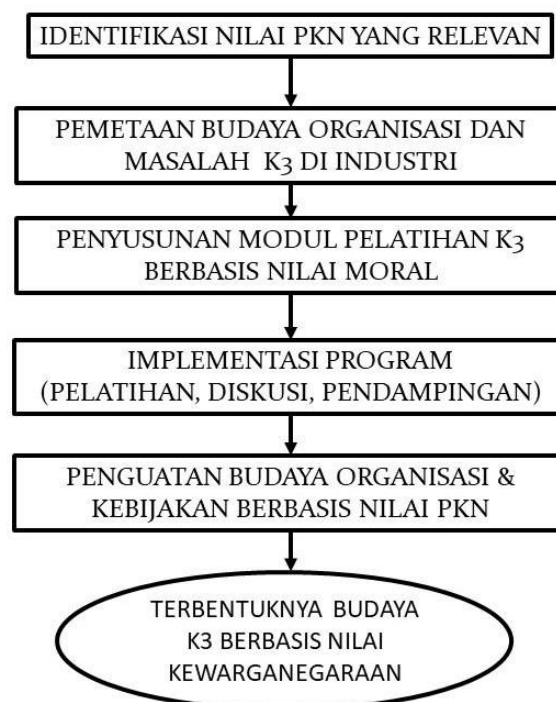
Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai moral ke dalam pelaksanaan program K3 mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pembentukan karakter, sosial, dan budaya yang ditanamkan dalam kegiatan pelatihan, komunikasi organisasi, dan interaksi di tempat kerja. Nilai-nilai PKn seperti tanggung jawab, kepedulian sosial, kepatuhan hukum,

etika kerja, dan partisipasi aktif dapat dimasukkan dalam materi pelatihan K3 atau budaya kerja perusahaan.

Caranya adalah dengan (1) Mengontekstualisasikan nilai-nilai PKn ke dalam situasi kerja nyata misalnya, nilai kepedulian sosial diterapkan dalam saling mengingatkan penggunaan APD. (2) Mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam modul pelatihan K3, baik formal maupun informal. (3) Mendorong interaksi sosial dan diskusi nilai moral antar pekerja, sesuai prinsip Konstruktivisme Sosial, agar pekerja belajar melalui dialog dan bimbingan. (4)Menguatkan norma keselamatan berbasis budaya organisasi, sehingga norma subjektif (dalam TPB) mendorong pekerja bertindak sesuai nilai-nilai moral PKn.

Tahapan agar PKn berbasis nilai moral bisa terintegrasi sebagai langkah untuk meningkatkan perhatian terhadap aspek K3 dalam dunia industri dengan beberapa langkah sistematis sebagai berikut: (1) Identifikasi nilai-nilai PKn yang relevan dengan konteks K3 di industri (misalnya: tanggung jawab, solidaritas sosial, etika, hukum). (2) Pemetaan kebutuhan budaya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. (3) Perancangan kurikulum atau modul pelatihan K3 berbasis nilai-nilai PKn. (4) Implementasi pelatihan dan pembiasaan melalui simulasi, diskusi kelompok, dan pembimbingan di tempat kerja. (5) Evaluasi internalisasi nilai dan perubahan perilaku melalui observasi, survei sikap, dan audit K3. (6) Penguatan budaya organisasi dan kebijakan perusahaan yang mendukung internalisasi nilai-nilai moral secara berkelanjutan.

Bagan 1. Model Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Moral dalam K3:



Menurut Dewey (2008), pendidikan merupakan proses pembaruan makna dari pengalaman. Proses ini dapat terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari maupun dalam hubungan antara orang dewasa dan anak muda. Selain itu, pendidikan juga dapat dilakukan secara terencana dan dilembagakan guna memastikan keberlanjutan sosial. Menurut (Notoatmodjo, 2010) Tingkat pendidikan seseorang memengaruhi cara mereka merespons berbagai hal dari lingkungan sekitar. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung merespons informasi secara lebih rasional serta mempertimbangkan sejauh mana manfaat yang

dapat diperoleh dari gagasan tersebut. Menurut Dasim Budimansyah, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk secara terencana dan metodis menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, membentuk budaya positif, dan membina siswa agar menjadi warga negara yang baik, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Budimansyah, 2016).

Menurut penelitian Akbal (n.d.), tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air di kalangan generasi muda. Hal ini dicapai melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan inti dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menyiapkan individu agar dapat menjalankan perannya secara aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara (to be a good citizen) (Wahab, 2011). Kemudian (Sartika et al., 2024) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan membekali individu dengan pemahaman tentang penghormatan dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan, menginternalisasi norma-norma serta nilai-nilai kebajikan, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk mengembangkan generasi muda di negara ini yang memiliki keterampilan berpikir kritis serta rasa tanggung jawab dan kewajiban dalam aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat kewarganegaraan. Pendidikan ini untuk mengembangkan generasi muda Indonesia yang mampu berpikir secara kritis dan memiliki rasa tanggung jawab atas peran serta kewajiban mereka sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, program ini juga berperan dalam mempersiapkan seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi bagian dari komunitas global yang cerdas dan berlandaskan nilai-nilai kewarganegaraan.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman untuk menyiapkan masyarakat yang berperan sebagai warga negara dengan karakter kuat, bertanggung jawab, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nilai pertama adalah nasionalisme, yang menanamkan perasaan patriotisme dan kebanggaan terhadap jati diri bangsa, serta kesediaan untuk membela dan menjaga pelestarian negara. Selain itu, patriotisme menjadi nilai yang mendorong warga negara untuk berani mengorbankan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, Demokrasi berperan sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, di mana Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta turut terlibat dalam proses demokratis yang adil. Mereka menjadi elemen kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pemerintahan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang adil. Nilai Hak asasi manusia (HAM) juga merupakan aspek krusial dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan penghormatan, perlindungan, dan melestarikan hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi.

Selain itu, nilai persatuan dan kesatuan memperkuat keberagaman yang tercermin dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis meskipun berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Toleransi pun menjadi bagian yang tak terpisahkan, mengajarkan warga negara untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Tidak kalah pentingnya, kebebasan yang bertanggung jawab mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berekspresi dan berpendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan norma sosial. Keadilan sosial memastikan juga menjadi nilai fundamental yang kesejahteraannya merata bagi seluruh rakyat tanpa adanya ketimpangan. Terakhir, kesadaran

hukum dan peraturan menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang taat aturan serta menjunjung tinggi supremasi hukum demi terciptanya harmoni dan keadilan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan erat dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di industri. Nilai-nilai yang ditekankan dalam PKn, seperti tanggung jawab, kepatuhan hukum, etika, partisipasi, berpikir kritis, dan solidaritas sosial, berperan penting dalam melindungi pekerja dari risiko menjalankan tugas dengan baik serta menjaga terciptanya suasana kerja yang aman dan sehat. Sebagai contoh, nilai tanggung jawab sosial mendorong pekerja untuk lebih patuh terhadap prosedur K3, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, solidaritas sosial di lingkungan kerja dapat menciptakan budaya saling mengingatkan dan membantu dalam penerapan prosedur K3, sehingga meningkatkan keselamatan bersama. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai PKn dalam program K3 tidak hanya meningkatkan kesadaran pekerja terhadap keselamatan, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih sadar akan pentingnya K3. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan dalam PKn tidak hanya relevan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi landasan yang memiliki peran krusial dalam membangun budaya keselamatan kerja di industri. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta membangun tempat kerja yang lebih selamat dan efisien.

Menurut penjelasan dari (Ramli, 2010) Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian dari perlindungan ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar bagi semua pekerja. Namun, keberadaan kecelakaan kerja yang masih terjadi menjadi kendala dalam penerapan K3 di berbagai sektor. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah elemen mendasar dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Di tengah perkembangan industri modern, kesadaran akan pentingnya K3 semakin meningkat seiring dengan semakin kompleks dan beragamnya risiko yang dihadapi. Faktor utama penyebab kecelakaan kerja adalah kondisi berbahaya, seperti pengaturan yang kurang aman, prosedur Pekerjaan yang tidak memenuhi standar, serta penggunaan pakaian dan perlengkapan yang kurang memadai. Sementara itu, tindakan berisiko yang sering dilakukan oleh pekerja meliputi kelalaian dalam menggunakan alat pelindung diri serta cara memuat dan mengangkat beban yang tidak aman.

Menurut penelitian Ramadhani & Hasibuan (2024) menjelaskan bahwa Penerapan K3 yang optimal tidak hanya menjaga karyawan tidak hanya mengurangi bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh sebab itu, alokasi sumber daya untuk pelatihan K3 menjadi hal yang esensial bagi setiap organisasi yang ingin memastikan kelangsungan dan keamanan operasionalnya. Lalu penelitian Perdana (2021) menemukan beberapa fenomena yaitu para pekerja dan perusahaan menyadari bahwa ketidakpatuhan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan aspek penting, namun masih terdapat sebagian pekerja dan perusahaan yang masih melakukan praktik ketidakpatuhan dengan kesadaran yang tinggi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tujuan yang terarah.

Pelatihan atau training K3 bagi pekerja memiliki peran krusial dalam meningkatkan kondisi maupun lingkungan kerja. Secara fundamental, upaya perbaikan K3 di tempat kerja kerap menghadapi kendala akibat rendahnya kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat. Pelatihan K3 merupakan langkah preventif yang berhasil dalam membangun lingkungan kerja yang lebih

aman. Program ini dirancang untuk membekali karyawan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan guna mengidentifikasi serta mengelola potensi Risiko di lingkungan kerja. Selain itu, pelatihan K3 berperan dalam membangun budaya keselamatan yang kuat dalam organisasi, di mana setiap individu turut serta dalam menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri maupun rekan kerja. Dengan demikian, pelatihan K3 tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, Namun juga berfungsi sebagai wadah untuk membangun perilaku dan pola pikir yang lebih proaktif terhadap keselamatan kerja (Ramadhani & Hasibuan, 2024).

Dalam penelitian Rahayu & Kurniati (2025), keselamatan kerja merupakan tanggung jawab bersama yang mencakup seluruh pekerja dan pihak terkait, termasuk masyarakat luas. Jika sebuah organisasi mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi karyawan, dengan risiko yang umumnya terjadi adalah meningkatnya kasus kecelakaan atau penyakit di kalangan pekerja tanpa adanya perhatian atau dukungan medis dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami bahwa penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting .

Regulasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia diatur dalam hierarki peraturan yang meliputi berbagai tingkat, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Hierarki ini dimaksudkan untuk memastikan penerapan yang efektif di sektor kerja. Di tingkat tertinggi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur dasar-dasar keselamatan kerja, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Peraturan Pemerintah, seperti PP Nomor 50 Tahun 2012 dan PP Nomor 21 Tahun 2013, memberikan pedoman teknis lebih lanjut, sementara pada tingkat teknis, terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 mengatur prosedur pemeriksaan K3 untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan di tempat kerja. Dengan regulasi yang tersusun secara sistematis, kebijakan K3 di Indonesia dirancang untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman serta melindungi pekerja dari potensi kecelakaan. Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan yang mengatur kewajiban terkait kondisi kerja secara umum, termasuk aspek perencanaan, konstruksi, pemeliharaan, pengawasan, pengujian, serta prosedur penggunaan peralatan industri. Selain itu, peraturan ini juga mencakup tanggung jawab pengusaha dan pekerja, pelatihan, supervisi medis, pertolongan pertama (P3K), serta perawatan medis. Keberadaan peraturan K3 memiliki dampak signifikan terhadap kejadian kecelakaan kerja. Oleh karena itu, peraturan tersebut perlu dirancang dan diterapkan dengan optimal guna mencegah serta meminimalisir risiko kecelakaan (Swaputri, 2010)

Teori konstruktivisme sosial dikembangkan oleh Lev Vygotsky dan menekankan bahwa pembelajaran dan pembentukan perilaku individu terjadi dalam konteks sosial melalui interaksi dengan orang lain. Menurut (Vygotsky, L. S., & Cole, 1978), individu membangun pemahamannya melalui interaksi dengan orang lain, terutama mereka yang lebih berpengetahuan. Vygotsky menolak gagasan bahwa pembelajaran adalah proses individu semata, seperti yang dikemukakan oleh teori kognitivisme Piaget. Sebaliknya, ia berpendapat Pembelajaran merupakan proses sosial yang dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan, bahasa, dan budaya.

Dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hal ini menjadi sangat penting karena pelatihan keselamatan tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga mengandalkan pembelajaran melalui pengalaman dan bimbingan (scaffolding) di tempat kerja. Konsep Zona

Perkembangan Proksimal (ZPD) yang dikemukakan Vygotsky memungkinkan pekerja yang belum kompeten sepenuhnya dalam K3 belajar secara bertahap melalui pendampingan dari pekerja senior. Penelitian oleh Rahayu & Kurniati (2025) menunjukkan bahwa partisipasi sosial dalam pelatihan dan diskusi antar pekerja memperkuat internalisasi nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kepedulian sosial, yang menjadi inti dari budaya keselamatan kerja. Berbeda dengan pendekatan yang lebih teknis dan individualistik seperti yang digunakan John (2008), yang menekankan pentingnya pelatihan K3 berbasis prosedur dan manual kerja, pendekatan konstruktivisme sosial menawarkan dimensi tambahan berupa pembentukan nilai dan sikap melalui interaksi sosial. Hal ini juga didukung oleh Dewey (2008) yang menyatakan bahwa pengalaman sosial merupakan sumber utama pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan.

Dengan demikian, teori ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mengembangkan pelatihan K3 berbasis nilai, di mana Pendidikan Kewarganegaraan dapat diintegrasikan melalui kegiatan interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan, guna menanamkan nilai-nilai moral seperti solidaritas, disiplin, dan etika kerja. Integrasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan, tetapi juga membentuk budaya keselamatan kerja yang kokoh dan partisipatif.

Menurut *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, namun juga oleh faktor-faktor lain, faktor sosial dan persepsi terhadap kendali atas perilaku tersebut. Dalam konteks ini, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana integrasi nilai-nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian kolektif, dapat Membangun kesadaran dan kepatuhan tenaga kerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di dunia industri. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyediakan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk memahami pembentukan perilaku K3 melalui tiga faktor utama: persepsi terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. TPB memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bahwa individu akan lebih mungkin bertindak sesuai dengan aturan K3 jika mereka memiliki sikap positif terhadap keselamatan, mendapatkan tekanan sosial dari lingkungan, dan merasa mampu untuk menjalankan prosedur K3.

Dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sikap terhadap perilaku tercermin dari sejauh mana pekerja memandang keselamatan sebagai sesuatu yang penting. Penelitian Perdana (2021) menunjukkan bahwa sikap positif terhadap keselamatan secara signifikan meningkatkan niat untuk mematuhi prosedur K3. Norma subjektif, yaitu persepsi individu tentang harapan sosial di lingkungan kerja, juga memainkan peran penting. Budaya organisasi yang mendorong keselamatan, serta dukungan dari atasan dan rekan kerja, menciptakan tekanan sosial positif yang mendorong kepatuhan terhadap protokol K3 (Endriastuty & Adawia, 2018). Selain itu, *Perceived Behavioral Control* berkaitan dengan keyakinan pekerja atas kemampuan mereka untuk menerapkan perilaku keselamatan. Penelitian oleh Ramadhani & Hasibuan (2024) menunjukkan bahwa persepsi terhadap dukungan organisasi, seperti penyediaan APD dan pelatihan keselamatan yang memadai, berpengaruh terhadap kepatuhan pekerja terhadap standar K3.

Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan temuan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dapat menguatkan ketiga aspek dalam TPB. Nilai tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum membantu membentuk sikap positif. Partisipasi aktif memperkuat norma subjektif, sedangkan rasa solidaritas dan empati meningkatkan *perceived control* dalam menjalankan prosedur keselamatan. Pendekatan ini

memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas penerapan TPB tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial melalui penerapan nilai-nilai kewarganegaraan.

Integrasi Teori Konstruktivisme Sosial dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memberikan fondasi konseptual yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku keselamatan kerja berbasis nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan. Teori Konstruktivisme Sosial menekankan bahwa nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, solidaritas, dan kepedulian sosial dapat diinternalisasi melalui interaksi sosial, bimbingan, dan pembelajaran kolektif di lingkungan kerja. Sementara itu, TPB menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku membentuk intensi dan perilaku nyata terhadap kepatuhan terhadap K3. Melalui pendekatan konstruktivistik, nilai-nilai PKn dapat ditanamkan dalam praktik kerja sehari-hari melalui pelatihan berbasis pengalaman, diskusi kelompok, dan peran model dari pekerja yang lebih senior. Di sisi lain, pendekatan TPB menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat memperkuat determinan psikologis dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan, seperti keyakinan terhadap manfaat K3 (sikap), tekanan sosial dari rekan kerja (norma subjektif), dan rasa percaya diri dalam menerapkan prosedur K3 (*perceived behavioral control*).

Dengan menggabungkan kedua teori ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap K3 tidak cukup hanya berbasis pengetahuan teknis, tetapi memerlukan pembentukan nilai-nilai moral melalui proses sosial dan kognitif. Oleh karena itu, pelatihan K3 di industri perlu dirancang tidak hanya sebagai transfer informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan budaya kewarganegaraan yang mendukung keselamatan kerja secara berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam program K3 meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap protokol keselamatan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, dan partisipasi aktif tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai pendorong perilaku yang lebih aman di tempat kerja. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pendidikan dan pelatihan, pekerja dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait keselamatan kerja, yang pada gilirannya menciptakan budaya keselamatan yang lebih kuat dan produktif. Berdasarkan Teori Konstruktivisme Sosial dan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran keselamatan terbentuk melalui interaksi sosial dan norma subjektif. Hasil temuan ini menyarankan pengintegrasian nilai-nilai kewarganegaraan dalam program pendidikan dan pelatihan K3 untuk mendukung lingkungan kerja yang lebih aman.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Akbal, M. (n.d.). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. In *Seminar Nasional Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. 2, 485–493.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Budimansyah, D. (2016). Pendidikan nilai moral dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan: menyambut 70 tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewey, J. (2008). *Experience and Education, Pendidikan Berbasis Pengalaman. Terjemahan. Teraju.*
- Endriastuty, Y., & Adawia, P. R. (2018). Pengetahuan Tentang K3 Terhadap Budaya K3 Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ecodemica*, 2(2), 193–201. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Hakim, I. F., Naili, M., Sabrina, A., Anja, I., & Iqbal, M. (2024). Analisis Hubungan dan Implikasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Kompetensi Inti. *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 20–30. <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v3i1.400>
- Hasrinal, Darma, I. Y., & Diana, J. R. (2018). Hubungan Unsafe Act Dan Unsafe Condition Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Mobil. *Kesehatan Medika Saintika*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/https://jurnal.syedzasaintika.ac.id>
- ILO. (1998). *Encyclopedia of Occupational Health and Safety*. Edited by J. M. Stellman.
- ILO. (2018). *Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda. Kantor Perburuhan Internasional (CH-1211 Geneva 22 (ed.))*.
- Indah, A. (2017). Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, 19, 1–8.
- Irkas, A. U. D., Fitri, A. M., Purbasari, A. A. D., & Pristya, T. Y. (2020). Hubungan Unsafe Action dan Unsafe Condition dengan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Industri Mebel. *Toxicology and Industrial Health*, 11(3), 363–370. <https://doi.org/10.1177/07482337221098600>
- Irzal. (2016). *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Kencana.
- Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, R. (2021). Integrasi nilai-nilai pancasila untuk membangun karakter pelajar pancasila di lingkungan kampus. *Jurnal Gatranusantara*, 19(1), 62–70.
- John, R. (2008). *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (3rd ed.). Erlangga.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Perdana, R. M. (2021). Analysis of Theory of Planned Behavior (TPB) in Disobedience Behavior towards Occupational Health and Safety (K3). *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 4(02), 140–148. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v4i2.199>
- Primadianto, D., Karisma Putri, S., & Alifen, R. S. (2018). Pengaruh Tindakan Tidak Aman (Unsafe Act) Dan Kondisi Tidak Aman (Unsafe Condition) Terhadap Kecelakaan Kerja Konstruksi. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 7(1), 77–84. <https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-sipil/article/view/7036>
- Rahayu, Y. M., & Kurniati, P. (2025). *Membangun budaya keselamatan kerja melalui partisipasi sosial untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan*. 5(1), 243–249. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.704>
- Ramadhani, T. N., & Hasibuan, A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi : Tinjauan Literatur. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 550–555.
- Ramli, S. (2010). *Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001*. Dian Rakyat.
- Reaso, M. M., & Wibowo, D. H. (2022). Hubungan Servant Leadership Dengan Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan. *Motiva Jurnal Psikologi*, 5(1), 38. <https://doi.org/10.31293/mv.v5i1.6353>
- Saraswati, Y., Ridwan, A., & Iwan Candra, A. (2020). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Analisis K Gedung Kuliah Bersama Kampus Unair Surabaya, Pembangunan C. *JURMATEKS: Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 3(2), 247–260. <https://doi.org/http://dx.doi.org/>
- Sartika, R., Maftuh, B., Nurdin, E. S., & Budimansyah, D. (2024). *Pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri dalam Mata Kuliah*. 9(2), 266–276.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmayadi, T., Maarif, M., Fitri, H. R., Dewi, A. K., Merkuri, Y. G., & Haryanti, A. N. (2024).

- Membangun Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa melalui Literasi Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(2), 245–256. <https://doi.org/10.24269/dpp.v12i2.9388>
- Swaputri, E. (2010). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja. *Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 95–105.
- Vygotsky, L. S., & Cole, M. (1978). *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wahab, A. . (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Zead, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.